



Draf Perubahan Segera Disampaikan

KETUA DPRD Melawi, Abang Tajudin mengingatkan pemerintah untuk segera menyampaikan draf APBD perubahan. Proses ini, wajib dilakukan mengingat dalam APBD Melawi. Ada beberapa kebijakan yang mestinya masuk dalam APBD penyempurnaan, baru bisa ditetapkan dalam Perubahan APBD, seperti soal pembayaran hutang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD

2018, persetujuan bersama Pemda dan DPRD tentang perubahan APBD ditetapkan paling lambat akhir September.

“Bila melewati akhir bulan ini, maka Pemda dianggap tidak melakukan perubahan APBD,” katanya.

Tajudin pun mengingatkan Pemkab Melawi segera menyampaikan draf KUA PPAS APBD P 2018. Sehingga rancangan Perda Perubahan APBD bisa segera diselesaikan.

“Sekarang sudah *last minute*. Kita minta ini segera disampaikan cepat,” terangnya.

Plt Kepala BPKAD Melawi, Andri Suparto menjelaskan keterlambatan pembahasan APBD perubahan disebabkan karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan Keuangan Pemkab Melawi 2017 baru diterima pada 5 September lalu. LHP menjadi salah satu syarat untuk penyusunan perubahan APBD. **(eko/lis)**